

---

## Daftar Pustaka

- Anita Siti Hajar “*Perkembangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi*”(Suatu Kajian Dari Perspektif Demokrasi dan Hukum). Yogyakarta: Program Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia, 2011 .
- A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi, Pada Daerah Tingkat II*,Cetakan ke tiga, 1998, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Salim, *Bangunan Teori, Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*, Tiara Wacana, (Yogyakarta, 2006).
- Busrizalti “*Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*”Total Media,(Yogyakarta,2013).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005,
- Christine S.T. Kansil “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Cetakan Pertama Agustus, 2003, Penerbit.PT Bumi Aksara, (Jakarta:2003).
- Darwis, *Konflik Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Daerah di Kabupaten Morowali*, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (s3), Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012
- Elfiza” *Pengaturan Pemerintah Aceh Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Dalam Negara kesatuan Republik*

- 
- Indonesia(NKRI)*, Program Magister(s2) Ilmu Hukum Universitas IslamIndonesia, Yogyakarta, 2011
- Ermaya Suradinata, “*membangun daerah menuju indonesia bangkit*”, Celex Media Komputindo, (Jakarta, 2008)
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, menuju konsolidasi sistem demokrasi*, Cetakan ke 5, Penerbit, Universitas Atma Jaya (Yogyakarta2009).
- Hani Harin” *Pemekaran Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah*” ( Studi Pada Kab./Kota Induk Sebelum Dan Setelah Pemekaran ), Program Magister Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2012.
- Hanifah “*Makalah ,DPR Setuju Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.
- Hari Sabarno “ *Pelaksanaan Otonomi Menuntut Kontrol Sosial Yang Efektif*” Kompas Selasa, 19 Maret 2002..
- Josef Rihu Kaho “ *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”Cetakan Pertama Desember 1988,( Penerbit Cv Rajawali Jakarta).
- J. Kaloh” *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*” Suatu Solusi dalam Menjawab *Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Pertama,2002, Pt Rineka Cipta, Jakarta.

- 
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*( analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah),, Kreasi Total Media Yogyakarta, cetakan pertama september 2008.
- Murtir Jeddawi “*Prokonta Pemekaran Daerah (analisis empiris)*” Cetakan 1,2009.Penerbit Total Media( Yogyakarta)
- Moh. Mahfud MD “*politik Hukum Di Indonesia*” Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2009),
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI’Era Reformasi*’Penerbit. Ramdani Prakarsa 2005 (Jakarta Indonesia)..
- Murtir Jeddawi “*Prokontra Pemekaran Daerah*”Cetakan 1, 2009. Penerbit, total media(Yogyakarta ).
- Memperingati hari OTDA XIX Tahun 2015
- Nur Sujarwo “ makalah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Papua” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2003/2004
- Ni’matul Huda, “*Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan – Penyempurnaan*” Cetakan Pertama Mei 2004.FH UII Press Yogyakarta.
- Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofis, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar,(Yogyakarta), 2005.
- Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, ( Yogyakarta: Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program pascasarjana FH UII, 2008 ),
- Ni’matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit. FH UII Press, (Yogyakarta 2010).

---

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke 8 2013, Penerbit. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Otda Jendela Informasi Ditjen Otonomi Daerah, Hari Otda 2015 Membangun Daya Saing Daerah. Penjabaran/ Operasional Visi-Misi Pemerintah Kabinet Kerja Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tanpa Halaman

Penjatuhan Rezim Presiden Soeharto karena kediktatoran selama 30 tahun lebih yang menekan rakyat Indonesia sehingga kristalisasi kemarahan rakyat terimplikasi pada pergantian rezim Soeharto

Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku pedoman penulisan Tugas Akhir (Tesis ) Magister Ilmu Hukum*, ( Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Rio Tinto, *Otonomi Atau Federtalisme, Dampak terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, (jakarta, 2000),

Ryaas Rasyid: Usulan Pemekaran Wilayah Harusnya dari Pusat Timbulnya insiden rencana pemekaran wilayah di beberapa daerah membuat Presiden mengeluarkan moratorium. Sementara itu, pakar otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mengusulkan agar pemekaran wilayah berasal dari Pemerintah Pusat. Sabtu, 21 Pebruari 2009

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2012).

Siswanto Sunaryo “ *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*”Cetakan ke 3 November 2009. Penerbit Sinar Grafika. (Jakarta 13220 ).

---

Sunaryo, Jurnal Bhineka Tunggal Ika'' *Menelaah Masalah pemekaran daerah di Indonesia dalam kaca mata perluasan kesejahteraan dan demokrasi''*.

Tri Wahyuni SH, " Pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah NKRI", (studi terhadap UU No. 5 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaanya), Program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia 2012.

Utang Rosidin "Otonomi Daerah dan Desentralisasi" *Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*, Cetakan ke 1: Penerbit Cv Pustaka Setia, Bandung 40253.

Zuhri sayfudin. " *Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah*" Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Thun2007" Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

---

### **Sumber Internet**

[www.hukumonline.com/berita/baca/hol21268/ryaas-rasyid-usulan-pemekaran-wilayah-harusnya-dari-pusat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21268/ryaas-rasyid-usulan-pemekaran-wilayah-harusnya-dari-pusat).

[Pajak.go.id/blog-entry/kp2kp,maba/sekilas-terbentuknya-kabupaten-halmahera-timur](http://Pajak.go.id/blog-entry/kp2kp,maba/sekilas-terbentuknya-kabupaten-halmahera-timur)

### **Sumber Wawancara**

Djon Ngoraitji SH, Ketua DPRD Halmahera timur, wawancara di kantor DPRD Halmahera timur, 16/08/2015

Hasyim Goruaping, selaku Tokoh Masyarakat Wasile, Wawancara di kediaman beliau, 07-08-2015

Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, di kediaman Bupati, 21-08-2015

Hasil wawancara Diderjen Otonomi Daerah. Bpk. Ir. Gunawan digedung Direktorat Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta Pusat, 05/04/2015.

Dokumen Usulan: Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Wasile (Sebagai salah satu Wilayah Perbatasan Negara di Prov. Maluku Utara).

Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010

---

Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus  
(PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010

